**PELAKSANAAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)
BERDASARKAN KEPMENEG PU NO.11/KPTS/2000
DI KABUPATEN ATAU KOTA(Studi di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas
Hukum Universitas Islam Indragiri*

Oleh :

M. SYAHRIN

301111010034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2017**

PELAKSANAAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN(WMK)
BERDASARKAN KEPMENEG PU NO.11/KPTS/2000
DI KABUPATEN ATAU KOTA(studi terhadap
Di badan penanggulangan bencana daerah
Kabupaten Indragiri Hilir)
Oleh: M.SYAHRI

Pembimbing: Kms Novyar Satriawan,SH,MH,dan Jamri,SH,MH

ABSTRAK

Berdasarkan Kepmeneg pu no.11/kpts/2000 tentang Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan ,menjelaskan fungsi pemerintah dalam menjalankan dan mengurus keperluan /kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.WMK dalam pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan public di era desentralisasi yang memegang peranan penting dan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat serta memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara merata.

Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Berdasarkan Kepmeneg PU NO.11/KPTS/2000 Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir. 2) Apa factor penghambat Pelaksanaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Berdasarkan Kepmeneg PU NO.11/KPTS/2000 Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Indragiri hilir. 3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi factor penghambat pelaksanaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Berdasarkan Kepmeneg PU NO.11/KPTS/2000 Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Indragiri hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau yang diperoleh langsung dari masyarakat.sedangkan sipat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif.Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan tersier,analisa data yang dilakukandengan observasi dan penarikan kesimpulan dilakukan dari umum kekhusus(deduktif)

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:1)Pelaksa wilayah manajemen kebakaran(WMK) yang dilakukan oleh aparat Badan Penanggulang Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Indragiri hilir secara procedural telah memenuhi unsur unsur pelaksanaan hukum ,namun dalam pelaksanaannya WMK belum berjalan secara aktif. 2)Faktor penghambat pelaksanaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Berdasarkan Kepmeneg PU NO.11/KPTS/2000 Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir.3)Upaya yang dilakukan pelaksanaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Berdasarkan Kepmeneg PU NO.11/KPTS/2000 Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agung Hendarto dan Nizar Suhendra, *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, 2002

Andi Gajong Agussalim, *Pemerintahan daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UUI, Yogyakarta, 2001

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, *Panduan Penulisan Skripsi*, Alaf Riau, 2014

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007

Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Wali Press, Jakarta, 1991

Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 2008

M. Ryaas Rasjid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3SE, Jakarta, 1998

Noer Fauzy dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Konsersium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INSIST, Press, Yogyakarta, 2000

Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Rahmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013

Ridwan HR, *Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten atau Kota.

C. Makalah / Jurnal

Jimmy Assidique, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945”, *Makalah*, disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

M. Lukman Hakim, Otonomi Daerah Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Made Suwandi, “Review Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Makalah*, disampaikan dalam seminar tentang Pemerintah Daerah antara Indonesia dan Jepang di IPDN Jatinagor, Sumedang, Oktober 2010.

Sumber Informasi data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir, Data Jumlah Bencana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015.

Ali Azhar, KMS Novyar Satriawan Fikri. 2020. Study Of Law Number 9 Off Regarding Freedom Of Speech In Publice, International Journal of Scientific & Technology Research 9(1) : 4002-4006

Mulono Apriyanto, KMS. Novyar Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar, Jamri, Ali Azhar. 2020. Penyuluhan Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Dan Legalitas Lahan Di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1(1) : 1-16

KMS Novyar Satriawan Fikri , Ali Azhar. 2020. Academic Study Of District Formation South Indragiri. *Progressive law review* 2 (1) : 1-13

KMS Novyar Satriawan Fikri, Ali Azhar. 2020, Implementation of Discipline Policy for Civil Servants in Indragiri Hilir Regency Post Covid Pandemic 19, *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.

Mulono Apriyanto, KMS Novyar Satriawan Fikri, Ali Azhar, 2020. Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas 1 (2) : 238-247.

KMS Novyar Satriawan Fikri, Herdiansyah, 2019. To Fighting The Covid 19 Virus In Indragiri Hilir. *Jurnal Hukum DAS SOLLEN3* (2) : 23-45

KMS Novyar Satriawan Fikri, Fauziah Rahmah. 2018. Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Terhadap Pasal 4 Huruf C dan D). *Jurnal Hukum DAS SOLLEN* 1 (4) : 1-10

D. Internet

Bpbd.sukoharjo.go.id>kebakaran di akses Selasa 13 Desember 2016 Pukul 02.00 WIB.

http://pemadamapi.wordpress.com.definisikebakaran di akses Selasa 13 Desember 2016 Pukul 02.00 WIB.

Lisanofrianti.blogspot.com/2010/10/pendekatanempirisdesi di akses Selasa 13 Desember 2016 Pukul 02.00 WIB.

Id/wikipedia.org/wiki di akses Selasa 13 Desember 2016 Pukul 02.00 WIB.

E. Interview

Hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Oktober 2016

Hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Oktober 2016

Penyebaran angket terhadap Anggota BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 22 Oktober 2016 di BPBD Kabupaten Indragiri Hilir